

NEOLIBERALISME: GENEALOGI KONSEPTUAL, RELEVANSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN SOSIAL MODERN

NEOLIBERALISM: CONCEPTUAL GENEALOGY, ITS RELEVANCE AND IMPLICATION TO MODERN SOCIAL POLICY

Muhammad Belanawane S

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. (021) 8017146 Fax. (021) 8017126
E-mail: mbs010104@gmail.com

Abstract

In the wake of the recent financial crisis, there has been renewed interest in thinking critically about the pro-market form of governance known as neoliberalism, through its genealogy instead of hegemonic discourses. Insofar that its highly relevant is how its paved the way to critical examination of today's two influential body of approaches towards neoliberalism: Marxists' structural and Foucaultian non or post-structural. In doing so, this paper propose Foucault's 1978-9 lectures at the Collège de France as a centrality to critical genealogy of neoliberalism because how its mapping the emergence of different national trajectories of neoliberal reason from the mid-twentieth century onwards. It is also, potentially, a history of the present, or what Foucault calls, a critical or effective history: a history that can be used to question the lines of descent that lead to the present while at the same time opening possibilities for thinking otherwise. The imperatives of this paper is then two fold: using Marxists and Foucault's point of view to contribute to the genealogy of neoliberal by considering the formative period of neoliberal reason from the 1920s onwards; and then, situating those debates to expand the possibilities for thinking critically about the present in order to makes sense as to how a politics of neoliberalisation might proceed and sustain today.

Keywords: *neoliberalism, neoliberalism history, foucaultian, marxist, structuralist approach, non-structuralist, neoliberal policy.*

Abstrak

Pasca krisis finansial, terdapat ketertarikan baru dalam berpikir kritis neoliberalisme sebagai bentuk pengaturan pro-pasar, melalui genealogi ketimbang diskursus hegemonisnya. Ia bisa menjadi sangat relevan sejauh keberhasilannya membuka jalan untuk menguji secara kritis dua pendekatan berpengaruh atas neoliberalisme: struktural Marxis dan Foucaultian non atau pasca-struktural. Dengan mengajukan kuliah Foucault pada 1978-79 di College de France sebagai sentral terhadap genealogi kritis neoliberalisme karena bagaimana ia dapat memetakan kemunculan loncatan-loncatan akal neoliberal dari negara berbeda sejak awal abad 20. Ia juga menghadirkan, secara potensial, sebuah sejarah masa kini, atau apa yang Foucault sebut, sebuah 'sejarah kritis atau efektif': sejarah yang dapat digunakan untuk mempertanyakan garis turunan yang mengantarkan kita pada masa kini sekaligus membuka kesempatan untuk berpikir berbeda. Tujuan tulisan ini dua lapis: pertama, menggunakan sudut pandang Marxis dan Foucaultian dalam membuat genealogi neoliberal dengan mempertimbangkan periode awal pemikiran neoliberal pada 1920an dan selanjutnya; dan kemudian, menyituasikan perdebatan tersebut untuk memperluas kemungkinan berpikir kritis tentang masa kini dalam rangka mengerti bagaimana politik neoliberalisasi dapat berlanjut dan bertahan hari ini.

Kata kunci: *neoliberalisme, sejarah neoliberalisme, foucaultian, marxis, pendekatan strukturalis, pendekatan non-strukturalis, kebijakan neoliberal.*

PENDAHULUAN

Diskusi publik tentang neoliberalisme di Indonesia boleh dibilang kosong hingga sampai tahun 2009, ketika efek krisis finansial global mulai terasa di tanah air. Mengikuti tren global yang menyalahkan paham ekonomi pro-neoliberalisme seperti *neoclassical* yang menguasai mainstream ekonomi global, istilah ‘neoliberalisme’ mulai masuk ke dalam wacana ruang-ruang publik seperti media dan, mungkin dalam skala yang lebih kecil, perdebatan dalam ranah akademik. Sentimen anti-neoliberalisme semakin mengemuka ketika Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang mencalonkan diri untuk periode kedua 2009-2014, menunjuk sejumlah ekonom-ekonom yang dianggap sebagai kelompok ‘neolib’ ke dalam kabinetnya, termasuk menggandeng ekonom liberal Budiono sebagai Wakilnya. Termasuk ke dalam perkembangan ini, mulai mendapat tempatnya sejumlah ekonom anti-mainstream untuk berbicara di dalam diskusi publik ataupun wawancara media-media besar, sesuatu yang mungkin jarang terjadi sebelumnya.

Lebih dari sekedar ilusi, penggunaan istilah ‘neoliberalisme’ dalam diskusi publik di media dalam bentuk ‘pengumuman kematian neoliberalisme’ dan proklamasi perbaikan kebijakan dalam rangka menindaklanjuti kematian tersebut menjadi banal ketika dikontraskan dengan situasi canggung yang terjadi di banyak sudut di seluruh dunia pada saat masyarakat awam bertanya-tanya sambil mengernyitkan alis, apa sih neoliberal itu? Penulis bersikeras menyebut ini banal karena sayangnya, tidak seperti dinamika diskursus global tentang neoliberalisme, perkembangan menarik di Indonesia, mungkin bahkan hingga

hari ini, tidak sampai menggeser cara pandang yang melulu berbicara tentang aspek-aspek mengglobal dan neokolonial atas reformasi neoliberal kepada sesuatu yang lebih substantif yang di antara fungsinya dapat menjawab pertanyaan masyarakat awam tadi.¹

Krisis finansial dunia 2008-2009, yang dimulai dari kolapsnya perbankan dan institusi keuangan derivatif di Amerika Serikat pada pertengahan 2008 hingga meluas ke Amerika Latin, Eropa lalu ke Asia, tidak terkecuali Indonesia, telah menghadirkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bukan saja ekonomi dan politik tetapi juga sejatinya tentang kehidupan sosial, hukum, demokrasi, teknologi, bahkan kondisi modernitas yang kita hidup di dalamnya itu sendiri. Mengutip judul buku terkenal sosiolog Perancis, Bruno Latour, *We Have Never Been Modern*, mungkinkah sesungguhnya kita tidak pernah modern, sehingga seluruh ‘keahlian’ dan ‘teknologi’ yang peradaban kita klaim telah capai, tidak dapat memprediksi apalagi mencegah krisis ekonomi terbesar sejak 1930, yang mempengaruhi bukan saja makroekonomi tetapi juga skema perlindungan sosial hingga harga cabai merah di pasar. Di Amerika Serikat dan Eropa, banyak yang berpikir bahwa krisis finansial ini menandakan sebuah kematian neoliberalisme dan bahwa era baru di depan mata akan menjadi saksi ‘kembalinya negara’ dan regulasi pasar. Seakan masih belum cukup, Joseph Stiglitz, ekonom kritikus pasar bebas, melakukan tur keliling dunia mengumumkan akhir hayat neoliberalisme, sementara figur politik negara maju seperti Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, mengumumkan ‘rehabilitasi’ intervensi pemerintahnya dalam dunia ekonomi.

1. Baca tulisan James Ferguson, “The Uses of Neoliberalism” [2009. Antipode, 41(S1): 166-184] tentang bagaimana banalitas penggunaan neoliberalisme juga terjadi dalam dunia akademik. Ferguson menemukan bahwa dengan membuat perbedaan analitis antara “seni pemerintahan” neoliberal dengan “proyek/program” ideologis berbasis kelas dari neoliberalisme, dapat diidentifikasi sejumlah bentuk baru (praktik) politik mengejutkan yang mengilustrasikan bagaimana mekanisme neoliberal yang sangat polyvalent atas pemerintahan dapat terjadi. Menariknya bagi dunia kebijakan sosial, Ferguson menggunakan contoh-contoh empirik dari penelitiannya tentang kebijakan sosial dan politik anti-kemiskinan di Selatan Afrika.

Belakangan kita tahu bahwa selain berfungsi kondusif sebagai de-mobilisasi politis, pengumuman kematian tersebut hanyalah ilusi yang bersumber dari kesalahan diagnostik yang menyebar dalam memahami neoliberalisme dan aspek-aspeknya.

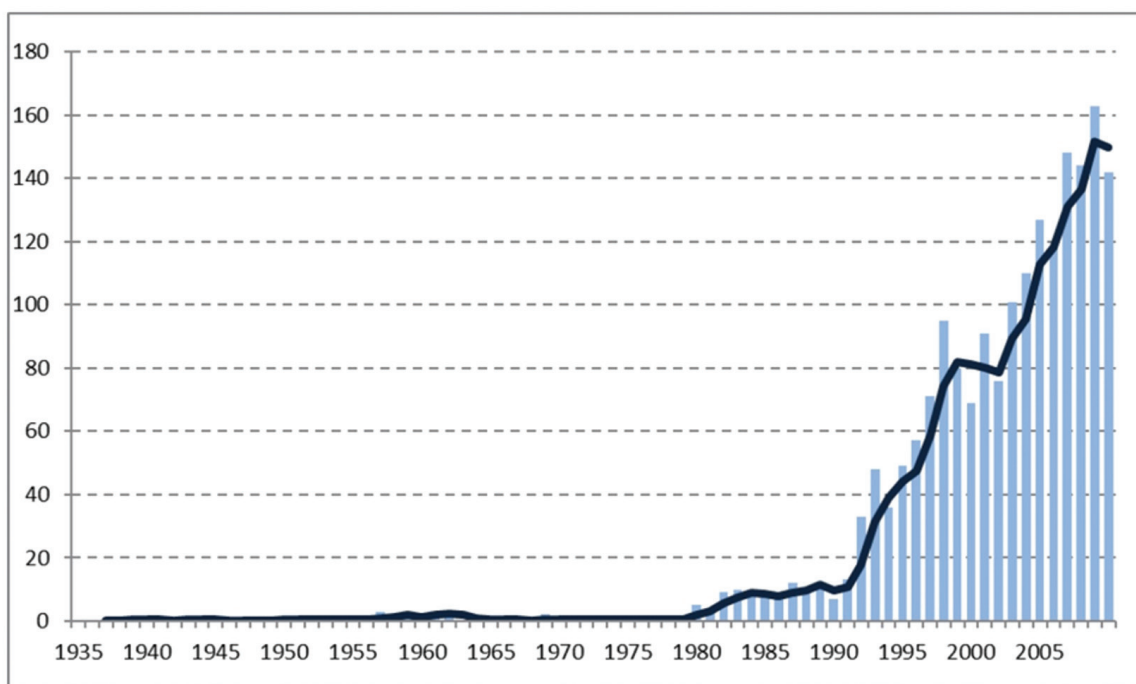
Janganakan merusak kebijakan neoliberal, krisis ini justru mengantar pada penguatan yang dramatis, terutama dalam bentuk strategi penghematan anggaran (*austerity*) yang disusun negara yang semakin aktif dalam mempromosikan logika kompetisi dalam pasar finansial. Sehingga menjadi jelas, terlebih melihat *afterfacts* dari krisis 2008, bahwa analisis terhadap awal mula dan keberfungsian neoliberalisme menjadi kian penting sebagai prekondisi bagi perlawanan yang efektif dalam skala global. Sebaliknya, salah dalam mengenali karakteristik neoliberalisme, mengabaikan sejarahnya dan luput dari kedalaman aspek-aspek sosial dan subyektifnya, adalah membutuhkan diri sendiri di hadapan perkembangan yang akan terjadi. Tulisan ini adalah sebuah upaya sederhana untuk menelusuri sejarah asal-muasal (*genealogi*) konseptual neoliberalisme dengan tetap mengontekstualisasikan setiap perkembangan ke dalam konteks historisnya sehingga ini juga berarti menekankan relevansi dan implikasi strategis sosialnya pada masing-masing rezim politik. Dengan kata lain, pemahaman terhadap neoliberalisme berfungsi bukan saja sebagai klarifikasi politis terhadap sebuah logika normatif global, tetapi juga pemahaman akan ke-universal-an isu neoliberalisme itu sendiri.

Pergeseran Paradigma dalam Pemahaman Politik terhadap Neoliberalisme

Istilah ‘neoliberalisme’ telah menjadi semakin familiar dalam beberapa tahun terakhir ini. Istilah ini relatif tidak pernah terdengar hingga tahun 1990an, tetapi kemudian

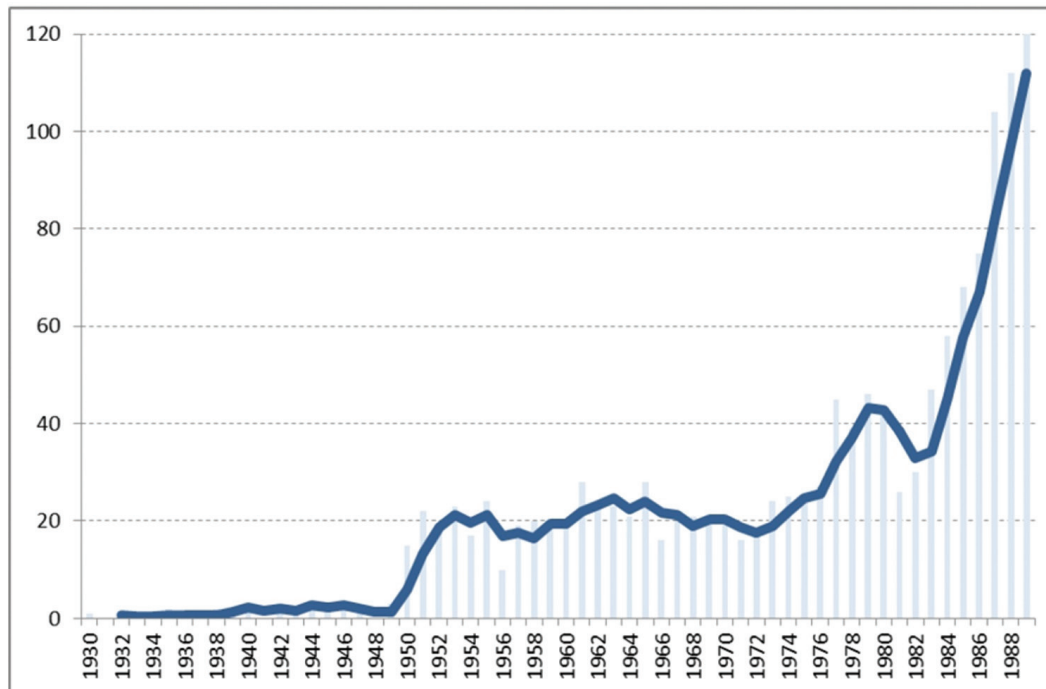
diadopsi secara prinsip oleh kritikus ketika itu akan penganut fenomena ekonomi global yang disebut pasar bebas (*free market*), yang menyebar ke seluruh dunia di bawah naungan ‘*Washington Consensus*’. Salah satu momen sejarah khas yang kita kenang dari era 90an adalah munculnya pergerakan anti-globalisasi yang menjadi terkenal ketika memprotes pertemuan *World Trade Organisation* (WTO) pada tahun 1999 di Seattle, Amerika Serikat. Pergerakan-pergerakan sosial ini, sebagaimana juga pergerakan serupa yang muncul di banyak tempat pada era ini hingga ke millennium baru, seperti Zapatista di Kolombia misalnya, semakin memperkuat makna konotatif yang dikandung neoliberalisme sebagai sebuah bentuk fundamentalisme pasar, yang dipaksakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan institusi multilateral secara global khususnya pada negara-negara berkembang. Asumsi yang melandasi versi neoliberalisme yang ‘jahat’ ini adalah karena ketika itu ia muncul bersamaan dengan terpilihnya pimpinan politik yang mewakili kelompok ‘*new right*’, secara khusus Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, pada akhir dekade 70an dan awal 80an. Akan tetapi pada waktu itu hampir tidak terdapat karya ilmiah mengenai sejarah panjang pemikiran neoliberal yang mendahului pergeseran politik global ini.

Dalam konteks internasional, masa-masa awal krisis finansial global pada pertengahan 2007 menarik perhatian baru kepada makna dan sejarah neoliberalisme, sekaligus menggarisbawahi prioritas yang disematkan kebijakan neoliberal pada pasar dan institusi finansial. Fakta bahwa krisis ini sekilas dianggap berasal dari pusat dan motor kapitalisme global, yaitu Wall Street, telah menggeser fokus dari aspek mengglobal dan neokolonial reformasi neoliberal menuju ke pertanyaan tentang rasionalitas dan genealogi neoliberalisme.



The blue curve indicates the moving average (period of 3 years).

Grafik 1. Jumlah buku yang terpublikasi dengan akar kata ‘neoliberal’ pada judul antara 1930-2010 (Brennetto, 2014)



The blue curve indicates the moving average (period of 3 years)

Grafik 2. Jumlah artikel jurnal terindeks JSTOR dengan referensi pada ‘neoliberalisme’ antara 1930-1990 (Brennetto, 2014).

Didorong oleh asumsi pergeseran paradigma ini, gelombang baru karya ilmiah muncul, yang menaruh perhatian yang lebih besar pada sejarah pemikiran neoliberal, melebihi penekanan pada pergeseran geopolitik global pada dekade 80-an hingga awal 90-an (dualisme Thatcher & Reagan, runtuhnya Uni Soviet, unifikasi Jerman Barat & Timur, untuk menyebut beberapa) yang berlaku sebelumnya. Pergeseran paradigma ini juga membedah peran historis dan politis lembaga-lembaga think tank, seperti Perkumpulan/Masyarakat Mont Pelerin dan tradisi akademik, seperti mazhab ekonomi Chicago.

Dalam upaya untuk menghindari dari penyederhanaan penggunaan konotatif istilah neoliberalisme, yang dapat dikaitkan secara luas dengan bermacam bentuk kekuasaan anti-demokratik dan pro-korporasi, pendekatan yang lebih historis akan menggarisbawahi perkembangan cair dan dinamis atas konsep ini. Akan tetapi, pendekatan ini juga berisiko jatuh pada deskripsi murni sejarah tanpa kritik atau pengabaian terhadap bagaimana gagasan diterjemahkan menjadi kebijakan dan strategi. Pendekatan lain berupaya menerapkan metode sosiologis dan kritis yang bertujuan untuk menguji aspek-aspek mana saja dari neoliberalisme yang bekerja di antara golongan elit dan pemerintahan masa kini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa banyak tepatnya (aspek) neoliberalisme yang selamat dari krisis finansial global dan melalui cara-cara bagaimana kelangsungannya dapat dicapai.

Definisi neoliberalisme dari literatur-literatur sejarah, politik, ekonomi dan sosioantropologis adalah beragam. Akan tetapi menurut William Davies (2014) definisi-definisi tersebut cenderung terbagi menjadi empat hal:

1. Liberalisme Victoria (Inggris era 1832/1837 s.d. 1901) dipandang sebagai sebuah

inspirasi bagi neoliberalisme, bukan sebuah model. Neoliberalisme adalah kekuatan inventif, konstruktivis dan memodernisasi yang bertujuan untuk memproduksi sebuah model sosial dan politik baru, dan bukan untuk menghidupkan model lama sebagaimana secara sekilas ditunjukkan oleh namanya. Neoliberalisme bukan sebuah proyek konservatif atau nostalgia.

2. Mengikuti ini, kebijakan neoliberal menasar institusi-institusi dan aktivitas-aktivitas yang terdapat di luar pasar, seperti universitas, rumah tangga, administrasi publik dan perkumpulan dagang. Hal ini dimungkinkan untuk: membawa mereka ke dalam pasar, melalui tindakan privatisasi; atau untuk membentuk ulang mereka dalam cara-cara ‘pasar’; atau semata untuk menetralsir atau membubarkan mereka.
3. Untuk melakukan ini, negara harus menjadi sebuah kekuatan yang aktif, dan tidak dapat semata-mata bergantung pada ‘kekuatan pasar’. Di sinilah perbedaan terbesar neoliberalisme dengan liberalisme Victorian. Negara neoliberal diharuskan untuk memproduksi dan mereproduksi aturan-aturan perilaku institusi dan individu, dalam cara-cara yang selaras dengan visi politik dan etik tertentu.
4. Visi politik dan etik ini didominasi oleh gagasan tentang aktivitas kompetitif, yang berarti, produksi ketimpangan. Kompetisi dan ketimpangan dinilai secara positif di bawah naungan neoliberalisme, sebagai sebuah prinsip non-sosialis bagi masyarakat secara umum, hanya melalui nilai dan pengetahuan ilmiah dapat dikejar dengan cara paling baik.

Batasan definisi dari Davies ini menyiratkan sebuah benang merah penting yang luput dalam banyak kajian kontemporer tentang neoliberalisme: kekeliruan dalam membedakan neoliberalisme dengan liberalisme itu sendiri yang menandakan bahwa *neo* bukanlah

perubahan tetapi perombakan besar. Intinya, liberalisme klasik membayangkan negara sebagai penjaga malam yang mengatur batasan-batasan bagi pertumbuhan alami pasar, layaknya seorang penggembala terhadap gembalaannya. Pasar dilahirkan, tidak dibuat. Prinsip-prinsip *good governance* dan kebebasan akan dipimpin oleh hak alamiah individu manusia, atau mungkin oleh penambahan tradisi yang bijak. Orang perlu dipelihara oleh negara agar dapat, utamanya, menemukan diri mereka sendiri, untuk bertindak sebagai warga negara yang sah dalam masyarakat liberal. Masyarakat akan dilindungi dari karakter mengganggu pasar dengan sesuatu yang John Stuart Mill istilahkan prinsip kerugian: kebebasan kepala tangan saya berhenti di kebebasan wajah Anda. Sebaliknya, neoliberal menolak semuanya itu, dan secara eksplisit mengatakan penolakan tersebut.

Jauh dari mencoba untuk menjaga masyarakat terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan dari operasi pasar seperti yang liberalisme demokratis berusaha lakukan, doktrin neoliberal justru mengatur secara aktif untuk membongkar aspek-aspek masyarakat yang mungkin menolak logika tak terhindarkan dari *catallaxy*², dan untuk membentuk ulang itu ke dalam gambaran pasar. Bagi para neoliberal, kebebasan dan pasar akan diperlakukan identik. Seruan mereka adalah untuk menghapus fondasi kebebasan dari hak alami atau tradisi, dan mereposisinya pada sebuah teori yang sama sekali baru tentang apa itu pasar, atau apa pasar itu seharusnya. Mereka tidak bisa mengakui hak-hak alami individu, karena mereka berusaha

untuk mengajari massa menjadi agen yang pasar akan paling mungkin anggap berhasil. Pasar tidak lagi memberi Anda apa yang Anda inginkan; Anda harus menyerah dengan apa yang diinginkan Pasar. Semua bidang kehidupan bisa lebih baik dikonfigurasi untuk berperilaku seolah-olah mereka seperti pasar. Gary Becker, seorang anggota MPS (*Mont Pelerin Society*), misalnya, mengusulkan pendekatan berbasis pasar untuk memungkinkan tingkat kejahatan yang optimal secara sosial, dan mendukung perpanjangan revolusioner kalkulus marginal untuk menyertakan “biaya bayangan” dan keuntungan terkait dengan semua “anak-anak, prestise atau harga diri, kesehatan, altruisme, iri hati, dan kesenangan inderawi.” Becker bahkan mengusulkan sebuah model ekonomi bagi “pasar kencan”: yang salah satu konsekuensinya adalah agar tawaran poligami untuk orang-orang kaya dapat dirasionalisasikan secara politik (Mirowski 2014). Hal ini dan sejumlah hal lainnya jika dikompilasikan akan cukup untuk membuat pendekar liberal klasik seperti Mill atau Michael Oakeshott berputar di kuburan mereka.

PEMBAHASAN

Peletak Dasar Pemikiran Neoliberal

Asal muasal neoliberalisme dapat ditelusuri hingga ke masa-masa yang mendahului era *The Great Depression* pada dekade 1930-an, dan pada tulisan-tulisan Ludwig von Mises yang mengeritik rasionalitas sosialisme. Karya-karya Mises, diantaranya Friedrich von Hayek juga menjadi kontributornya ketika itu, yang kemudian menjadi katalis munculnya

2. *Catallaxy* atau *catallactics* adalah istilah alternatif untuk ‘ekonomi’. Jika kata ekonomi mengisyaratkan bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki seperangkat nilai dan tujuan yang sama dan sejalan, *catallaxy* menyugestikan bahwa kandungan pasar (harga, pembagian kerja, pertumbuhan, dll.) adalah hasil perkembangan tujuan-tujuan beragam dan berbeda para individual dalam masyarakat. Istilah *catallaxy* digunakan oleh Friedrich Hayek untuk menggambarkan “keteraturan yang dimunculkan oleh penyesuaian saling menguntungkan dari banyak ekonomi individu dalam pasar.” Hayek tidak puas dengan penggunaan kata ‘ekonomi’ karena asal muasalnya dari bahasa Yunani kuno, yang diterjemahkan sebagai “manajemen rumah tangga”, menyiratkan bahwa agen-agen ekonomi dalam ekonomi pasar memiliki tujuan bersama. Hayek mengambil kata ‘*Catallaxy*’ dari kata kerja Yunani *katallasso* (καταλλάσσω) yang berarti tidak hanya “untuk bertukar” tetapi juga “untuk mengakui dalam masyarakat” dan “untuk mengubah dari musuh menjadi teman.” (Barry 1982).

perdebatan kalkulasi kaum sosialis pada dekade 1920 dan 30an, mempersoalkan sebuah pembaruan akan tuntutan liberalisme ekonomi. Liberalisme sebagaimana yang dikembangkan oleh *Victorian laissez-faire* dianggap mencapai puncak kejayaannya pada sekitar 1870, tetapi terus mengalami penurunan sejak itu, dengan bermunculannya korporasi, perkumpulan dagang, kebijakan sosial, sosialisme regulasi dan negara. Misi yang diemban oleh Mises, Hayek dan orang-orang yang mendukungnya adalah untuk membayangkan kembali liberalisme ekonomi dalam cara-cara yang apakah mengakomodasi perkembangan baru tadi atau dapat menolak/menyingkirkannya (Amable 2011, Brenner et al. 2010).

Dekade selanjutnya, 1930an adalah masa-masa penuh gejolak bukan hanya karena krisis ekonomi terparah dunia modern namun juga karena ia semakin memperburuk tren-tren anti-liberal seperti kemunculan kebijakan proteksionisme ekonomi, makroekonomi, dikeluarkannya kebijakan *the New Deal* di Amerika Serikat dan totalitarianisme di Eropa. Perkembangan ini semakin membuat cemas kaum liberal di negara-negara Eropa Barat khususnya, yang kemudian menyusun aksi menghidupkan kembali argumen yang mendukung sistem harga pasar, dalam semangat yang sama dengan apa yang telah dimulai Mises. Pada dekade ini pulalah diduga pertama kali istilah neoliberalisme digunakan secara publik. Tepatnya pada 1938, filsuf Perancis Louis Rougier mengorganisir *The Colloque Walter Lipmann* di Paris, dalam rangka mengenang Lipmann, jurnalis Amerika yang merupakan kritikus vokal kebijakan the New Deal (Phillips-Fein 2009).

Setelah Perang Dunia Kedua, pemikiran dan advokasi neoliberal mulai terbentuk dan menjadi lebih jelas. Tahun 1944 menjadi saksi terbitnya publikasi bestseller Hayek,

The Road to Serfdorm, yang menjadi sebuah teks pendahuluan yang monumental terhadap gagasan neoliberal untuk dekade-dekade selanjutnya. Pada 1947, Hayek mendirikan the Mont Pelerin Society, sebagai sebuah think tank dan jejaring bagi intelektual liberal dari seluruh dunia (Mirowski & Plehwe 2009). Lembaga think tank inilah yang pada masa-masa berikutnya menjadi saluran perantara krusial antara pemikir-pemikir neoliberal dengan para pembuat kebijakan. Periode pascaperang ini juga menjadi saksi semakin melebarnya perbedaan antara gaya neoliberalisme Eropa ('ordoliberalisme') dengan Amerika Serikat.

Neoliberalisme versi Jerman:

Ordoliberalisme dan Ekonomi Pasar Sosial

Hingga tahun 1950an, banyak pemikir neoliberal yang berpikir bahwa mayoritas elemen sosialisme atau paling tidak demokrasi sosial adalah tak terelakkan dan bahkan diperlukan. Oleh karena itu, misi yang dibutuhkan adalah untuk mencari ruang bagi pasar bebas bersama institusi-institusi social security dan aturan hukum yang kuat. Di Jerman, posisi ini diajukan oleh mazhab Ordoliberalisme, yang muncul di Freiburg pada dekade 1930an di bawah kepemimpinan Walter Eucken dan melalui publikasi jurnal *Ordo*. Kaum ordoliberal ketika itu pada umumnya adalah advokat dan filsuf liberal, yang menganut epistemologi neo-Kantian dan meyakini bahwa hukum harus digunakan untuk memberlakukan gagasan formal atas masyarakat. Gagasan kompetisi, sebagaimana dimanifestasikan dalam pasar bebas, dipandang sebagai sebuah penjamin hak-hak politik, tetapi tidak dapat diamankan oleh pasar semata. Oleh karena itu negara wajib memaksakan sebuah keteraturan kompetitif, melalui penegakan *anti-trust* normatif. Pasar yang dimandatkan secara hukum ini ketika itu sepenuhnya cocok dengan keberadaan institusi jaminan sosial

dan penyediaan kebutuhan publik yang kuat, memproduksi apa yang dikenal dengan *the social market* (Ptak 2009).

Hayek pada awalnya sangat simpatik pada posisi ordoliberal. Eucken dan sejawatnya ketika itu berpengaruh dalam merancang rekonstruksi ekonomi Jerman pada akhir dekade 1940an. Pemasukkan penyediaan kebijakan antitrust yang kuat pada konstitusi 1949 Jerman dan Perjanjian Roma 1957 yang membentuk komunitas Eropa hingga Uni Eropa dewasa ini juga adalah sebagian pencapaian ordoliberal.

Mazhab Chicago dan Imperialisme Ekonomi

Mazhab ilmu ekonomi Chicago adalah pemain penting yang berpengaruh sangat kuat dalam mengaplikasikan kebijakan neoliberal dari sejak dekade 1970an hingga seterusnya. Melalui upaya memperpanjang aliran ekonomi neo-classical kepada domain baru kehidupan sosial dan individual, melalui kategori seperti modal manusia, ia telah berkontribusi pada konstruksi subjektivitas neoliberal secara lebih luas lagi. Pada tahun-tahun awal 1920 dan 1930an, mazhab ilmu ekonomi Chicago tidaklah dikenal secara khusus dengan pemahaman liberalism, meskipun generasi pertama anggotanya, Frank Knight dan Jacob Viner, dicirikan karena memperkenalkan gaya logika yang agresif dan skeptis yang menginspirasi sejumlah pemikir generasi kedua di Chicago seperti Milton Friedman dan George Stigler. Generasi kedua ini, yang awalnya dipimpin oleh Aaron Director, secara prinsip dikenal karena keyakinan tegasnya dalam kapasitas ilmu ekonomi dalam menjelaskan segala bentuk tingkah laku manusia, apakah di dalam atau di luar pasar. Mereka dikritik untuk alasan ini sebagai imperialis ekonomi di dalam lingkungan disiplin ilmu ekonomi (Davies 2010, Van Horn 2011, Nik-Kah & Van Horn 2012, Van Horn 2013).

Secara konseptual, mazhab Chicago berpisah dari perspektif normatif dan idealis banyak dari para neoliberal Eropa sepanjang era 1950an. Secara khusus, mereka menjadi semakin skeptis akan regulasi dan sampai mengembangkan sebuah argumen yang mendukung efisiensi potensial monopoli dan perjanjian non-pasar sebuah argument yang sangat berpengaruh dalam otoritas *antitrust* di Amerika dari pertengahan 1970an hingga seterusnya. Dalam bidang makroekonomi, Friedman telah memprediksi runtuhnya Keynesianisme dan mengembangkan pembelaan terhadap moneterisme yang mulai dianut sejak 1970an. Tokoh Chicago lainnya, Gary Becker, melalui penerapan ilmu ekonomi *neoclassic* pada fenomena ‘sosial’ seperti pendidikan, keluarga dan kejahatan, merancang sebuah tipe visi kalkulatif psikologi tertentu yang dipandang banyak ahli sebagai pencapaian neoliberalisme yang paling transformatif. Dalam kaitan ini, mazhab Chicago dapat dipandang sebagai penerus warisan pemikiran pemikir liberal Inggris, Jeremy Bentham (Van Horn & Mirowski 2009).

Neoliberalisme in Action: Bertemunya Pemikiran Konseptual dengan Praktik Kebijakan

Krisis subdisiplin makroekonomi Keynesian yang ditandai oleh kemunculan *stagflation* pada awal 1970-an dan krisis produksi *Fordist* yang ditandai oleh penurunan pertumbuhan produktivitas dan keuntungan telah menciptakan sebuah kesempatan bagi sebuah paradigma baru pembuatan keputusan ekonomi. Hal ini pada awalnya dimanfaatkan hanya di Amerika Serikat dan Inggris Raya, sebelum kebijakan tersebut diekspor secara internasional melalui institusi multilateral dan para ahli ekonomi. Sebelum dobrakan ini Mazhab Chicago telah lebih dulu membentuk rezim kebijakan Pinochet di Chile, utamanya

disebabkan oleh pendidikan yang ditempuh ekonom-ekonom Chile di Chicago dan arahan yang diberikan Friedman pada Pemerintah Chile (Valdes 1995).

Analisis Marxis terhadap neoliberalisme terapan melihatnya sebagai mobilisasi negara, dalam rangka untuk mengembalikan nilai keuntungan. Pada titik ini, negara neoliberal menargetkan inflasi melalui kebijakan deflasi dan moneter, dan mengecilkan pengaruh perkumpulan dagang melalui legislasi, kekuatan polisi dan privatisasi. Efek dari hal ini adalah jauh lebih besarnya pemasukan pada modal (*capital*), dan sebaliknya pemasukan yang jauh lebih kecil pada tenaga kerja (*labour*), menghasilkan peningkatan yang dramatis dalam ketimpangan dari sejak 1980an hingga saat ini. Dengan menurunnya peluang-peluang investasi menyusul krisis Fordist-Keynesianisme, negara neoliberal menemukan jalur-jalur non-produktif menuju profit pada 3 sektor: privat yaitu dalam rumah tangga, sektor publik dan sektor finansial (Engelmann 2003, Engelen 2011, Burgin 2012).

Analisis pos-strukturalisme, yang sangat dipengaruhi oleh Foucault (sungguhpun Foucault tidak pernah menerima label *post-structuralist*), memandang neoliberalisme lebih sebagai upaya untuk membuat kembali kehidupan sosial dan personal dalam keseluruhan bentuknya, pada sekitar idealisme *enterprise* dan *performance*. Di sini, etos kompetitif dilihat sebagai budaya yang meresap, pendidikan, hubungan-hubungan personal dan orientasi kepada diri ke dirian, dalam cara-cara yang membuat ketimpangan (justru) sebagai indikator yang fundamental akan kadar etika atau keinginan. Bagi banyak teoretikus, para ekonom itu sendiri dipandang sebagai aktor politik, yang memperpanjang batasan kalkulasi (politik). Menurut cara pandang pos-strukturalis

ini, negara tetap merupakan aktor sentral dalam memaksa institusi-institusi membentuk ulang dan mengukur diri mereka sendiri menurut visi agensi-nya. Kebijakan neoliberal khas adalah mereka yang mendorong individu, komunitas, pelajar dan wilayah untuk mengekspresikan diri mereka sendiri secara kompetitif, dan memproduksi skor mengenai siapa yang menang dan kalah.

Terdapat kesamaan cara pandang antara Marxis dan pos-strukturalis dalam memahami neoliberalisme yaitu adanya kekuasaan dan otoritas aktor-ahli korporasi dan kuasi-korporasi yang semakin meningkat dalam kehidupan publik. Pada 1990, anggapan bahwa kehidupan sosial semakin kental diatur oleh perantara dan perusahaan privat non-negara mengantar pada kewaspadaan yang semakin meninggi terhadap pengaturan, sifat kepengaturan (*governmentality*) dan risiko sebagai teknik untuk menangani masyarakat neoliberal dalam gaya yang terkalkulasi. Sungguhpun sebenarnya adalah kebebasan manajerial aktor korporasi dan kuasi-korporasi yang dimaksimalkan di bawah neoliberalisme terapan, dan bukan pasar secara umum.

Neoliberalisme Pasca-Krisis Finansial 2008: 'Privatisasi Keuntungan dan Sosialisasi Kerugian'

Pada tahun-tahun menyusul krisis finansial global 2007-2008 dan *Great Recession* yang mengikutinya, muncul sejumlah perubahan pendekatan dalam penelitian tentang neoliberalisme. Pertama, terdapat kekhawatiran bahwa neoliberalisme dalam praktiknya telah bertransformasi menjadi *financialisation*. Ini berarti bahwa keuntungan yang didapatkan dalam sektor finansial menyebabkan bagian keuntungan yang lebih besar lagi secara keseluruhan, didapatkan terutama dari deregulasi finansial dan bertumbuhnya rumah

tangga, juga hutang konsumen dan pelajar. Tindakan penyalangan dana (*bail-out*) pada 2008 yang dilakukan oleh banyak negara terhadap bank dan perusahaan jasa finansial, termasuk di Indonesia, menggarisbawahi peran krusial negara dalam mengamankan sektor finansial untuk mengizinkan terjadinya apa yang disebut privatisasi keuntungan dan sosialisasi kerugian. Sebagai ganti dari meninggalkan sektor produksi yang *profitable*, neoliberalisme menemukan sumber-sumber *profit* lainnya melalui perluasan penghitungan risiko ke dalam area non-produktif dari kehidupan sosial, yang kemudian dapat ditarik ke sektor ekonomi finansial. Ketika terjadi kondisi dimana sebagian atau seluruh risiko ini tidak dapat ditangani oleh sektor ekonomi finansial swasta, ia lantas ditransfer ke negara. Dengan demikian, skema simbiosis neoliberal yang kompleks antara negara dan korporasi dalam hal ini bank menggapai sebuah bentuk baru.

Kedua, ketahanan neoliberalisme itu sendiri menjadi sebuah persoalan yang membutuhkan penjelasan. Secara paradoks, krisis finansial global justru mengakibatkan pada penguatan, bukan pelemahan, neoliberalisme dan para ahli yang mendukungnya. Negara justru semakin berkomitmen untuk membela kepentingan finansial, mengalahkan kepentingan politik lainnya, dan meningkatkan jangkauan finansial ke dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pinjaman atau hutang negara justru direpresentasikan sebagai penyebab krisis, bukan penghasil krisis, sehingga ini semakin memungkinkan terjadinya pembongkaran perlindungan sosial dan institusi sektor publik. Di sisi lain, krisis 2008 juga menghasilkan peluang kritis yang luas karena ideologi, legitimasi atau hegemoni neoliberalisme, sebagai sebuah sistem yang didedikasikan untuk kesempatan yang sama, kewirausahaan dan pembentukan-kekayaan, saat ini semakin

lemah ketimbang sebelum krisis. Saat ini terdapat sejumlah perdebatan tentang apakah neoliberalisme masih hidup, telah mati atau ada dalam kondisi paradoks seperti halnya zombie (Davies, 2014).

Neoliberalisme sebagai Revolusi dari Atas: Kritik Struktural Marxis

Salah satu buku paling penting tentang neoliberalisme, *A Brief History of Neoliberalism*, yang ditulis oleh David Harvey, seorang ilmuwan Marxis sekaligus Profesor Antropologi dan Geografi di City University of New York, telah membedah neoliberalisme sebagai fitur terpenting kehidupan ekonomi dan sosial abad 20 dan 21. Harvey berpandangan bahwa saat ini kita sedang menyaksikan, melalui proses neoliberalisasi, pendalaman penetrasi kapitalisme ke dalam institusi politik dan sosial bahkan ke dalam kesadaran budaya itu sendiri. Neoliberalisme adalah intensifikasi pengaruh dan dominasi modal; ia merupakan penasbihan kapitalisme, sebagai sebuah mode produksi, sebuah etika, seperangkat tujuan politik dan sebuah logika kebudayaan. Ia juga merupakan sebuah proyek untuk memperkuat, merestorasi atau dalam kasus lain mengonstitusi secara baru kekuatan elit ekonomi. Esensi neoliberalisme, bagi Harvey, dapat dikarakteristikan sebagai pergeseran ke kanan dalam pergumulan kelas sebagaimana yang diteoretisasikan Marx.

Analisis ini beranjak dari pemikiran Marx tentang kekhasan modal itu sendiri. Modal bukanlah sekadar uang, properti atau variabel ekonomi lainnya. Modal adalah prinsip yang mengatur masyarakat modern. Dalam *Grundrisse*, Marx secara eksplisit berargumen bahwa modal merupakan sebuah proses yang ikut memasukkan keseluruhan dimensi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan modern. Ia menciptakan sistem pengupahan, mempengaruhi nilai, sasaran dan

etika individu, juga mengubah hubungan kita dengan alam, dengan kita sendiri dan dengan komunitas kita serta terus-menerus mencari jalan untuk membentuk tujuan-tujuan negara sampai terdapat harmoni dengan kediriannya sendiri.

Oleh karena itu neoliberalisme bukanlah sebuah putar balik dalam sejarah kapitalisme. Akan tetapi, secara sederhana, intensifikasi dan kemunculan kembalinya setelah revolusi beberapa dekade dari paham negara kesejahteraan yang dikibarkan Keynesian paham ekonomi yang dominan ketika itu dan dari eksperimen dengan politik demokrasi sosial.

Harvey menjelaskan bahwa, neoliberalisme dalam prosesnya, menilai pertukaran pasar sebagai sebuah etika pada dirinya sendiri. Mampu bertindak sebagai panduan bagi semua tindakan manusia, dan menggantikan seluruh keyakinan etis yang berlaku sebelumnya, ia menekankan pada signifikansi hubungan kontraktual dalam lingkungan pasar. Ia (*neoliberalisme*) beranggapan bahwa barang dan jasa sosial akan dapat dimaksimalkan dengan memaksimalkan jangkauan dan frekuensi transaksi-transaksi pasar, dan ia berusaha membawa seluruh tindakan manusia ke dalam domain pasar (Harvey 2005: 3).

Walaupun begitu, neoliberalisme tidaklah sekadar sebuah etika abstrak. Sebaliknya, lokus untuk pengaruhnya telah menjadi apa yang dinamakan negara neoliberal, yang meruntuhkan gagasan tentang kebebasan menjadi kebebasan bagi elitekonomi. Mengutip Harvey (2005: 7-11), Kebebasan yang dikandungnya merefleksikan kepentingan pemilik properti swasta, bisnis, perusahaan multinasional dan modal keuangan. Negara neoliberal dapat dicirikan dengan pembelaannya pada jangkauan dan kedalaman baru dari kepentingan modal dan penolakannya terhadap liberalisme yang ditemplei (*embedded*)

pada peninggalan beberapa dekade menyusul Perang Dunia II. Ketika proses-proses pasar dan kegiatan kewirausahaan dan korporasi dikelilingi oleh jarring-jaring kendala sosial dan politik serta sebuah lingkungan peraturan yang kadang-kadang menahan tetapi dalam kasus lain memimpin jalan dalam strategi ekonomi dan industri (Harvey, 2005: 11).

Neoliberalisme dan negara neoliberal telah mampu membalikkan berbagai keuntungan politik dan ekonomi yang didapatkan dari era institusi dan kebijakan negara kesejahteraan. Transformasi negara dalam bentuk ini adalah efek dari kepentingan modal dan reaksinya terhadap liberalisme sempalan dari era pasca-perang. Pada puncaknya, Harvey (2005: 16) berargumen bahwa, Neoliberalisasi sedari awalnya merupakan sebuah proyek untuk mencapai restorasi kekuatan kelas. Sebuah proyek politik untuk memapankan kembali kondisi bagi akumulasi modal dan untuk merestorasi kekuasaan elit ekonomi. Pengertian revolusi dari atas untuk mengembalikan kekuasaan kelas seperti ini adalah *crème de la crème* dari analisis Harvey tentang neoliberalisme.

Preposisi ini, Harvey mendalami beberapa tataran praksis di beberapa negara dalam ranah kebijakan ekonomi dan bahkan juga sosial. Contoh historis pertama yang dibawakan Harvey dari revolusi dari atas ini, pada rezim Pinochet Chile. Kudeta kekerasan yang menggulingkan Salvador Allende, yang menaikkan Pinochet ke tahta, kemudian diikuti oleh proses neoliberalisasi yang luar biasa besar. Gerakan privatisasi massal dan pelucutan segala bentuk regulasi pada modal adalah salah satu aspek kunci rezim Pinochet. Meskipun landasan teori neoliberal telah dimulai jauh lebih dahulu dengan Mises, Hayek & Friedman, manifestasi empirik pertama dalam ranah kebijakan adalah rezim Pinochet Chile.

Melalui kontekstualisasi neoliberal Chile, Harvey dapat mengilustrasikan dimensi penting lain dari argumennya, yaitu bahwa neoliberalisme adalah liberalisme bagi elit ekonomi semata; dan bahwa aspek liberal dari masyarakat justru menurun. Kekhawatiran Harvey sebagaimana juga sejarawan dan antropolog ekonomi, Karl Polanyi bahwa rezim neoliberal akan secara perlahan mengikis institusi demokrasi politik karena kebebasan massa akan dibatasi demi kebebasan segelintir. Mengikuti ini sejumlah kebijakan aneh seperti mengisolasi institusi ekonomi seperti bank sentral dari aturan mayoritas menjadi sentral, khususnya karena neoliberalisme terlebih di ekonomi maju berkisar pada institusi finansial. Oleh karena itu, Harvey berargumen bahwa, Neoliberalisme memiliki preferensi yang kuat akan pemerintahan yang dijalankan oleh keteraturan eksekutif dan melalui putusan yuridis yang telah dikooptasi oleh prinsip deregulasi] ketimbang pembuatan keputusan demokratis dan parlementer. Tema hegemoni neoliberalisme serupa Harvey angkat dalam kasus praksis lainnya, yaitu rezim kebijakan neoliberal Thatcher di Inggris Raya dan Reagan di Amerika Serikat.

Setelah Chile, Amerika Serikat dan Inggris Raya, contoh praksis terakhir yang diangkat Harvey, yaitu fenomena pembangunan spasial yang tak seimbang di China era modern, menyiratkan sifat kualitas untuk dapat berada di konteks manapun (*ubiquity*) dan keragaman warna neoliberalisme. Harvey menggaris bawahi ekspansi masif etos neoliberal di China awal 1980 menyusul reformasi ekonomi Deng Xiaoping dimana pasar diliberalisasi secara signifikan dan dibangkitkannya sebuah elit ekonomi hanya dalam waktu semalam. Hasil dari pembangunan ini adalah ketimpangan ekstrim di antara wilayah-wilayah. Wilayah pesisir perkotaan, dimana industri dan sektor

finansial dikonsentrasikan, telah menjadi pusat kekuatan ekonomi yang besar, menyedot tenaga kerja surplus dari kawasan dataran tinggi yang agraris, yang sebaliknya sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan tadi, telah menjadi tenggelam ke dalam kemiskinan. Harvey melihat kenyataan di China ini terjadi di seluruh dunia, dan hasilnya juga mudah ditebak: pola kenaikan ekonomi diikuti ketimpangan sosial yang meningkatkan marginalisasi sejumlah besar bagian dari populasi nasional dan semakin mengonsentrasikan sektor-sektor modal yang hanya tumbuh di wilayah dan kelompok masyarakat (elit) tertentu. Neoliberalisasi, oleh karenanya, menghasilkan sebuah pembalikan kembali pada sebagian bentuk terdalam dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang khas pada ekspansi industri akhir abad ke-19 di Barat. Bagi Harvey, kisah kapitalisme sepertinya selalu memainkan lagu lama.

Akan tetapi ekspansi modal global itu sendiri dicirikan dengan apa yang Harvey istilahkan, akumulasi melalui disposisi (*accumulation by dispossession*). Konsep yang sebenarnya dikembangkan pada buku sebelumnya, *The New Imperialism*, (Harvey, 2003) berargumen bahwa akumulasi di bawah globalisasi terus berekspansi dengan melucuti orang dari hak ekonomi, dari beragam bentuk kepemilikan dan dari keberdikarian ekonominya.

Harvey (2005: 159-160) menjelaskan; "Dengan ini akumulasi melalui disposisi saya maksudkan keberlanjutan dan proliferasi praktik-praktik akumulasi yang dahulu Marx maknai sebagai sesuatu yang primitif atau asli selama masa kemunculan kapitalisme. Ini termasuk komodifikasi dan privatisasi lahan dan pengusiran paksa populasi petani. Bandingkan sebagaimana sebelumnya, kasus Meksiko dan China dimana diperkirakan 70 juta petani telah

dipindahkan dewasa ini; konversi berbagai bentuk hak properti (umum, kolektif, negara, dan lain-lain) kepada hak properti swasta eksklusif secara spektakuler dicontohkan oleh China; penekanan hak-hak rakyat umum; komodifikasi kekuatan tenaga kerja dan penekanan bentuk-bentuk alternatif (adat) produksi dan konsumsi termasuk sumber daya alam; moneterisasi jual beli dan pemajakan, khususnya tanah; perdagangan manusia yang terus berlanjut khususnya di industri seks; dan riba, hutang nasional serta, yang paling menghancurkan dari semuanya, penggunaan sistem kredit sebagai sebuah cara radikal akumulasi melalui disposisi. Negara, dengan monopolinya atas kekerasan dan definisi legalitas, memainkan peran yang krusial dalam mendukung dan mempromosikan proses ini. Pada daftar mekanisme ini sekarang kita juga dapat menambahkan: pengerukan sewa dari paten dan hak properti intelektual serta penghapusan berbagai bentuk hak properti umum seperti pensiun, liburan yang ditanggung, dan akses pada pendidikan dan layanan kesehatan”.

Dengan kata lain, bagi Harvey, neoliberalisme hanya dapat melanjutkan proses akumulasinya melalui melucuti orang akan apa yang mereka miliki, atau apa yang hak mereka selalu melekat padanya.

Neoliberalisme sebagai Persuasi dari Sekeliling: Kritik *Non-Structural Foucaultian*

Kuliah Michel Foucault pada 1978-79 di Collège de France baru dipublikasikan dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya pada 2008 dengan judul *The Birth of Biopolitics*, mengandung sebuah pandangan historis yang kaya akan loncatan-loncatan berbeda dari apa yang Foucault sebut seni pemerintahan liberal dan neoliberal: dari Adam Smith, Max Weber hingga ordoliberalisme Jerman di satu sisi, dan

dari Friedrich Hayek dan ekonomi pasar bebas mazhab Chicago di sisi lain. Kuliah-kuliah ini menyediakan sebuah titik tolak yang penting untuk berpikir kritis tentang basis teoretis proyek neoliberal seperti: mekanisme regulatoris yang melaluinya proses pemasaran bekerja; pengonstruksian sebuah *homo economicus* yang tidak hanya sekadar pasangan dalam pertukaran ekonomi tetapi juga kewirausahaan diri yang menjadi sasaran keusahaan dan produksi; tendensi logika neoliberal untuk menggunakan prinsip ekonomi pasar untuk menganalisis hubungan dan fenomena sosial non-pasar; dan dalam level yang lebih besar, munculnya konfigurasi pemerintahan baru yang berjalan simultan antara pasar dan negara (Gane, 2013).

Menjadi penting memosisikan perkuliahan Foucault pada akhir dekade 70-an ini sebagai sentral terhadap genealogi kritis neoliberalisme karena baiknya ia dalam memetakan kemunculan loncatan-loncatan logika neoliberal yang berbeda antar-negara dari sejak pertengahan abad 20 hingga saat ini. Ia juga menghadirkan, secara potensial, sebuah sejarah masa kini, atau apa yang Foucault sebut, mengutip Nietzsche, sebuah sejarah kritis atau efektif: sejarah yang dapat digunakan untuk mempertanyakan garis turunan yang mengantarkan kita pada masa kini sekaligus membuka kesempatan untuk berpikir sama sekali berbeda sebagai bentuk perlawanan terhadap keyakinan fatalistik Thatcher, *There is no alternative*.

Pandangan nonstrukturalis ini mengesankan secara kuat penolakan atas pendekatan deterministik strukturalis. Intinya, bahwa neoliberalisme tidak dapat direduksi maknanya sedemikian rupa semata pada aksi keyakinan fanatik pada kealamiahian pasar. Kesalahan yang mendasar yang dibuat oleh orang-orang yang telah mengumumkan kematian liberalisme adalah mencampur adukkan representasi ideologi yang menyertai implementasi

kebijakan neoliberal dengan normativitas praktis yang secara khusus mencirikan neoliberalisme. Sebagai hasilnya, tidak heran jika pendiskreditan seputar ideologi *laissez-faire* yang jamak terjadi hari ini tidak dapat mencegah neoliberalisme dari kedigdayaannya yang lebih dari masa sebelumnya sebagai sistem normatif yang mengandung sebuah efisiensi tertentu yaitu, kapasitas untuk mengarahkan dari dalam praktik pemerintahan, korporasi, yang sebenarnya dan di samping itu, jutaan orang yang tidak harus sadar akan fakta. Inilah inti persoalannya: bagaimana mungkin, meskipun konsekuensi-konsekuensi buruk dimana kebijakan neoliberal telah mengakibatkan, mereka malah semakin operasional, sampai pada tingkatan mendorong negara dan masyarakat ke dalam krisis politik dan regresi sosial. Bagaimana mungkin kebijakan yang telah dikembangkan dan diradikalkan selama lebih dari tiga puluh tahun tersebut tanpa menghadapi perlawanan yang cukup untuk memeriksa mereka?

Jawaban untuk pertanyaan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek negatif dari kebijakan neoliberal yaitu perusakan regulasi dan institusi secara terprogram. Dalam perspektif non-strukturalis, neoliberalisme tidak sekadar paham yang merusak aturan, institusi dan hak-hak sipil, menurut Dardot & Laval, "...ia juga memproduksi bentuk-bentuk tertentu dari hubungan sosial, cara-cara tertentu untuk hidup, sebuah subjektivitas tertentu" (2014: 3). Dengan kata lain, yang dipertaruhkan dalam neoliberalisme, tidak kurang dan lebih, adalah bentuk eksistensi kita sendiri cara kita memperlakukan, untuk berhubungan dengan orang lain maupun diri kita sendiri. Inilah yang disebut Dardot & Laval, norma eksistensial (2014).

Lebih jauh, Dardot & Laval menjelaskan (2014: 3):

"Neoliberalisme mendefinisikan sebuah normaeksistensialtertentudalam masyarakat Barat dan jauh lagi di luar mereka, serta masyarakat lain yang mengikutinya dalam jurusan modernitas. Norma ini memasukkan setiap orang untuk hidup dalam dunia kompetisi umum; ia mengajak kelas dan populasi yang bergantung pada penghasilan berbasis gaji untuk terlibat dalam pengumpulan ekonomi satu sama lain; ia memaksakan penyesuaian hubungan-hubungan sosial pada model pasar; ia mempromosikan justifikasi terhadap sebesar apapun ketimpangan; ia bahkan mengubah individu, yang sekarang dituntut untuk menundukkan dan memperlakukan dirinya sendiri sebagai sebuah bisnis. Selama lebih dari sepertiga abad, norma eksistensial ini telah menyingkirkan kebijakan publik, mengatur hubungan ekonomi global, mengubah masyarakat dan membentuk ulang subjektivitas. Kondisi kemenangan neoliberalisme sering kali digambarkan dalam aspek politiknya penaklukan kekuasaan oleh kekuatan neoliberal, aspek ekonominya ekspansi kapitalisme finansial global, aspek sosialnya pengindividualisasian hubungan sosial yang mengorbankan solidaritas kolektif, polarisasi ekstrim antara yang kaya dengan yang miskin, dan aspek subjektifnya kemunculan subyek baru, perkembangan patologi psikis baru. Ini merupakan sejumlah dimensi komplementer dari rasionalitas global yang baru. Dengan ini kami maksudkan bahwa rasionalitas yang demikian menjadi global dalam dua artian: ia bermakna di seluruh dunia dalam artian bahwa ia sampai menggapai skala mendunia; dan, jauh dari dikerucutkan ke dalam dunia ekonomi, ia cenderung untuk menyeluruh dalam hal menciptakan sebuah dunia dalam pengertiannya sendiri melalui

kekuatannya untuk mengintegrasikan seluruh dimensi dari eksistensi manusia. Sebuah rasionalitas global yang pada saat bersamaan juga sebuah logika-dunia”.

Neoliberalisme dan Penemuan Sosial: Relevansi dan Implikasi Kebijakan Sosial dalam Neoliberalisasi Indonesia Modern

Pem-bumi-an seluruh diskursus ini ke dalam konteks Indonesia adalah salah satu tujuan tersembunyi dari tulisan ini. Mengapa? Jawabannya karena penulis memandang terdapat kenaifan dalam beberapa lingkungan spesifik di Indonesia, yaitu ranah birokrasi kebijakan publik dan kebijakan sosial, demikian juga dalam wacana-wacana akademik yang terjadi antara ilmu ekonomi dan ilmu sosial segregasinya masih sangat kental, tidak seperti di luar negeri dalam memperbincangkan neoliberalisme secara khusus dan kapitalisme secara umum. Walaupun sebenarnya ini juga terjadi dalam konteks Barat (Mirowski 2013, 2014, Peck 2013, untuk menyebut beberapa), namun yang terjadi di Indonesia bukan hanya dominasi wacana tidak ada neoliberalisme di Indonesia, tetapi juga bahwa berkembang dan bertahannya mitos urban ini menjadi hegemoni di ruang-ruang publik. Efeknya, penulis berargumen, sebenarnya bukan saja membuat keringnya Indonesia dari perdebatan tentang neoliberalisme namun juga bahwa lebih berbahaya lagi, situasi ini berkembang lebih luas menjadi tertutupnya ruang-ruang untuk analisis kritis terhadap kebijakan sosial dan pembangunan di luar dari kritik struktural Marxis atau non struktural Foucaultian. Teknik yang digunakan adalah wacana-wacana sempalan di lembaga-lembaga penelitian tentang kondisi insularitas keilmuan, yaitu peneliti/ilmuwan sosial hanya boleh menganalisis fenomena sosial, bukan fenomena ekonomi, lingkungan, politik, dan berlaku juga sebaliknya.

Cara memahami fenomena sosial terkotak-kotak berdasarkan fragmentasi hukum, politis bahkan birokratis ini banyak penulis temui di lembaga-lembaga pembangunan sosial yang menghasilkan kebijakan dan program-program sosial. Sebagai akibatnya, khususnya dalam konteks kebijakan publik, ini bukan saja memproduksi kebijakan publik-sosial yang kacamata kuda (*myopic*) dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan yang terus menerus menempatkan masyarakat sebagai obyek, tetapi juga me-reproduksi justifikasi atau pembenaran. Apakah dalam bentuk *assessment* kebijakan atau penelitian kebijakan yang menyokong kebijakan dan program turunan kebijakan *myopic* tadi? Kondisi kebijakan yang ter-depolitisasi ini seakan membenarkan tesis lama seperti yang dikemukakan para pakar kritikus pembangunan seperti Ferguson & Escobar pada dua dekade lampau dan bahkan juga tesis baru pada hari-hari ini yang dikemukakan oleh ekonom politik semisal Ha-Joon Chang tentang insularitas keilmuan dalam dunia penelitian neoliberal dan *myopic perspective* dalam dunia kebijakan neoliberal.

Oleh karena itu menjadi penting menyinggung literatur ilmiah tentang Indonesia neoliberal dalam rangka untuk mengambil peran mengangkat literatur-literatur ini kepada perhatian publik yang lebih luas sekaligus untuk memposisikan neoliberalisme, proses dan teknik-tekniknya ke dalam *mainstream* perdebatan publik. Literatur pertama dalam daftar penulis adalah *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (2007) karangan Tania Murray Li, antropolog Kanada yang meneliti tentang pembangunan manusia, khususnya program-program penanggulangan kemiskinan pedesaan, di Sulawesi Tengah, lebih khusus dataran tinggi Lore Lindu. *The Will to*

Improve adalah sebuah deskripsi yang sangat kaya akan praktik-praktik pemerintahan yang, dipengaruhi oleh institusi nasional dan internasional, ditujukan pada peningkatan sistematis terhadap kondisi masyarakat miskin dan marjinal. Buku Li dibagi menjadi tujuh bab. Bab pertama menggambarkan sejarah pembangunan Indonesia selama 200 tahun terakhir hingga 1998. Lima bab berikutnya menampilkan etnografi yang kaya akan beragam program yang diformulasikan untuk meningkatkan kehidupan penduduk desa-desa di Sulawesi dari sejak awal masa kolonial hingga tahun pertama abad 21. Sepanjang buku, Li (2007:61) menjelaskan; rezim kolonial Belanda dan Jepang, dan neo-kolonial, institusi multilateral pembangunan Internasional seperti Bank Dunia, dan IMF. Sebagaimana juga elit nasional, regional dan lokal, memandang orang-orang miskin sebagai bodoh, terbelakang sehingga butuh peningkatan. Selain itu, praktik-praktik subsisten adat dianggap merusak lingkungan dan tidak produktif sehingga butuh perbaikan. Institusi yang melakukan pembangunan tertarik untuk meningkatkan populasi, lanskap, produktivitas; yang dalam prosesnya orang-orang dipaksa untuk menerima relokasi, diusir dari tanah mereka dan diarahkan untuk produksi pertanian intensif.

Dalam analisisnya, dengan melanjutkan sekaligus mengkritik karya-karya penting dalam studi pembangunan (Ferguson 1994, Escobar 1995, Mosse 2005), Li menggunakan Foucault (1991) untuk mendefinisikan tujuan pemerintah dan kedaulatan, untuk menteorisasikan batasan pemerintahan, dan untuk memahami kontrol sosial dan ketimpangan hubungan kekuasaan. Li juga menggunakan gagasan Gramsci (Crehan 2002) sebagai basis deskripsinya mengenai cara-cara orang memobilisasi perubahan dan protes sosial. Terakhir, Li juga menggunakan kerangka teori Marx sebagai pisau analisisnya

dalam memahami kondisi material dari eksistensi manusia.

Li, dalam tulisan lain menjelaskan tujuannya dalam penelitian ambisius ini (2011: 79):

“Fokus saya dalam bab ini adalah menggarisbawahi luar biasanya ruang lingkup, skala dan intensitas dari intervensi lapangan yang dibuka oleh pendekatan yang saya beri label memerintah melalui komunitas. Melalui berbagai tema pembangunan berbasis komunitas, penguatan modal sosial, restorasi tradisi lokal asli dan promosi pilihan para ahli telah mengonstruksikan sebuah lapangan teknis yang di dalamnya mereka dilisensikan dan diaktifkan untuk ikut campur tangan hingga dalam hal-hal kecil kehidupan masyarakat. Neoliberalisme bukanlah berarti lebih sedikit intervensi: ia bermakna intervensi yang dipikirkan dan dikonstruksikan di sepanjang garis-garis yang berbeda dan lebih halus...”

Literatur kedua yang juga signifikan untuk menjelaskan relevansi dan implikasi neoliberalisme terhadap pembangunan dan kebijakan sosial, masih mengambil konteks Indonesia, adalah Tenggelam dalam Neoliberalisme: Penetrasi Ideologi Pasar dalam Penanganan Kemiskinan (2012), tulisan Bagus Aryo yang diambil dari disertasi doktoralnya di program Kebijakan Sosial di University of Melbourne. Pada buku ini, Aryo, melalui penelitiannya tentang program penanganan kemiskinan melalui skema mikrofinansial yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digagas Kementerian Sosial, menjelaskan bagaimana neoliberalisme ekonomi berdampak pada pemikiran mengenai kebijakan kesejahteraan di Indonesia: dari pejabat tinggi dalam birokrasi hingga implementasi program di lapangan. Alih-alih menguraikan matinya pemerintahan, Aryo justru memperlihatkan

terjadinya penataan ulang peran sentral pemerintah.

Aryo mengakui bahwa, dalam skema program KUBE kerjasama antara pemerintah dengan LSM (BMT Kube Sejahtera), dampak positif tampaknya lebih dominan daripada dampak negatif. Namun demikian, Aryo juga menjelaskan sisi lain dari keberhasilan relatif itu yaitu munculnya pengusaha mikro dengan karakteristik tertentu, yang ternyata juga membawa program tersebut pada pemenuhan tujuan neoliberalis, yaitu mengintegrasikan masyarakat miskin ke dalam ekonomi pasar.

Mengutip teoretisasi Lemke (2001) terhadap konsep *governmentality*, Aryo mengungkap penetrasi neoliberalisme dalam bentuk yang dia istilahkan mencengkeram mentalitas yaitu, bahwa neoliberalisme bukan hanya sebagai retorika ideologis atau sebagai realitas ekonomi politik, namun di atas semuanya, sebagai sebuah proyek politik yang berupaya menciptakan suatu realitas sosial yang ia kesankan sudah ada. Program keuangan mikro merupakan sarana untuk menciptakan realitas sosial baru dan alat bagi negara untuk memanfaatkan kekuasaan disiplinernya dalam rangka membentuk masyarakat miskin menjadi pengusaha mikro. Atau secara radikal, mengubah masyarakat miskin dari penerima menjadi pelanggan yang memiliki karakteristik bertanggung jawab, mandiri dan spiritualistis. Selain itu keuangan mikro juga menyediakan alat dan kapasitas yang diperlukan oleh masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif di dalam pasar.

Bagi Aryo, tantangan umum yang dihadapi skema penanganan kemiskinan kolaboratif negara-LSM seperti BMT KUBE Sejahtera terletak pada bagaimana ia menyeimbangkan antara penanganan kemiskinan dan integrasi masyarakat miskin ke dalam ekonomi pasar, sambil secara bertahap mengubah

masyarakat menjadi sebuah masyarakat mandiri dengan membawa kapitalisme ke depan pintu rumah warga miskin. Temuan Aryo yang membedakannya dari penelitian *microfinance* lainnya adalah bahwa nilai-nilai spritualitas yang dipromosikan BMT kepada anggota-anggotanya telah secara relatif diklaim melindungi masyarakat miskin dari sisi ekonomi pasar yang tidak diinginkan. Diskursus tentang genealogi neoliberalisme, ini serupa dengan *argument foucault* mengenai masyarakat mandiri yang dibayangkan oleh ordoliberalisme Jerman: sebuah masyarakat untuk pasar, masyarakat yang menghadapi pasar, masyarakat yang berorientasi pada pasar, dan masyarakat yang mengimbangi efek pasar di bidang nilai-nilai dan keeksistensian.

Termasuk dalam konteks ini pula, penelitian sebelumnya tentang titik temu antara diskursus pembangunan dengan diskursus kebencanaan melalui studi kasus sebuah program pengurangan risiko bencana di Indonesia, berupaya membedah ortodoksi berbasis-komunitas yang diterima secara *taken for granted* dari mulai pemangku kebijakan level nasional hingga aktivis masyarakat level desa, saya menunjukkan bahwa inisiatif kebijakan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai sesuatu yang tak lebih dari pergeseran paradigma yang lebih luas dalam pembangunan dari bentuk dipimpin negara ke dipimpin pasar yang menggaris-bawahi adanya pengaruh paham ekonomi pasar radikal atau neoliberalisme (Belanawane S., 2015: 317-318).

Mengelaborasi teori dan praktik diskursus yang berkembang dalam studi pembangunan bencana, seperti partisipasi, desentralisasi, komunitas, bahwa terdapat penyederhanaan yang berbahaya dalam memahami konsep-konsep yang seharusnya problematik sebagaimana halnya jika ini diterapkan dalam bidang pembangunan apapun itu, yaitu

wacana politik dan kekuasaan dalam intervensi kebijakan kebencanaan di Indonesia. Sebagai akibatnya, praktik kebijakan yang sedari awal sudah diskursif ini menjadi semakin menyimpang dengan menjadi terlalu politis bagi Jakarta sebagai pemangku kebijakan dan sekaligus juga apolitis bagi warga sebagai target sasaran mesin pembangunan bencana di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta.

Ketika berusaha memahami fenomena ini dalam kacamata bahwa program pembangunan kebencanaan itu berlaku sebagai mesin anti-politik sebagaimana teori Ferguson (1994), aparatus pembangunan kebencanaan di Umbulharjo, bukanlah sebuah mesin untuk mengeliminasi kerentanan dan risiko bencana yang secara kebetulan disentuh oleh birokrasi negara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi bahwa, ia berfungsi sebagai mesin untuk memperkuat dan memperluas pengaplikasian kekuatan birokratis negara, yang secara kebetulan mengangkat kerentanan dan risiko bencana alam letusan Gunung Merapi sebagai titik masuk dan membenaran melalui sebuah intervensi yang mungkin saja tidak punya efek apapun terhadap dampak bencana itu sendiri tetapi justru berefek nyata pada hal lainnya (Belanawane S. 2013: 317).

PENUTUP

Memikirkan Ulang Solusi Kolektif akan Efek Neoliberalisme Pasca-Krisis Finansial

Neoliberalisme mengacu pada ide-ide, strategi dan kebijakan, yang telah diperkenalkan oleh para intelektual dan elit pemerintah, dengan harapan menciptakan kembali liberalisme ekonomi. Bertolak belakang dengan liberalisme abad ke-19, neoliberalisme dipahami sebagai ideologi yang aktif dirancang dan ditegakkan oleh negara (Foucault, 2008). Istilah ini diyakini pertama kali digunakan pada Colloque Walter Lippmann, sebuah konferensi yang

diselenggarakan di Paris pada tahun 1938 oleh para intelektual yang mencari alternatif untuk ekonomi yang direncanakan, Keynesianisme dan *The New Deal*, yang dominan pada saat itu (Mirowski & Plehwe, 2009; Burgin, 2013). Meskipun istilah itu sendiri masih jarang digunakan dalam beberapa dekade yang mengikutinya, ia menggambarkan gerakan intelektual pro-pasar yang dirakit pada era pasca-Perang Dunia II. Dikoordinasi melalui *think tank* dan jaringan internasional seperti *The Mont Pelerin Society*. Filsuf dan ekonom Austria, Friedrich Von Hayek, adalah tokoh sentral dalam merintis gagasan-gagasan neoliberal dan dalam memulai mengoordinasikan pergerakan intelektual yang menyokongnya. Mazhab Ekonomi Chicago, dari Universitas Chicago, yang dipimpin oleh Aaron Director selama tahun 1950 dan Milton Friedman selama tahun 1960 dan 70-an, adalah lembaga kunci dalam pengembangan aliran neoliberalisme Amerika yang khas dalam hal lebih bersimpatinya ia terhadap monopoli dan sebaliknya, lebih mencurigai regulasi ketimbang sebagian besar protagonis pemikiran neoliberal Eropa.

Menyusul krisis pembuatan kebijakan Keynesian selama awal 1970-an, gagasan-gagasan neoliberal dengan cepat memperoleh legitimasi intelektual dan politik yang lebih besar, terutama di Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini menyebabkan munculnya gelombang reformasi neoliberal, menyusul pemilihan Ronald Reagan dan Margaret Thatcher, yang menyebar secara internasional pada 1990-an melalui organisasi antar-pemerintahan seperti Komisi Eropa dan Bank Dunia, bersama dengan *think tank* seperti *The World Economic Forum*. Neoliberalisme terapan ini telah banyak dikritik sebagai anti-demokrasi dan didorong oleh kepentingan korporasi atau kelas (Harvey, 2005; Crouch, 2011). Krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2007 awalnya

diyakini menandai akhir dari era neoliberalisme terapan ini, namun sekarang kita dihadapkan pada kenyataan bahwa mungkin krisis itu justru semakin memperkuat proyek neoliberal (Mirowski, 2013).

Akhirnya, sebagaimana diargumentasikan oleh Harvey (2005), jalan keluar dari situasi ini mungkin tidak mengejutkan adalah sebuah penghubungan ulang (*reconnection*) antara teori dan praktik. Sekali lagi, analisis Harvey dalam menjelaskan ini teramat halus dan mempertimbangkan kenyataan politik saat ini. Sejumlah besar gerakan sosial perlu membentuk sebuah program oposisi berbasis luas, yang melihat aktivitas para elit ekonomi sebagai sesuatu yang fundamental menimpa keyakinan tradisional tentang egalitarianisme dan keadilan. Krisis, bagi Harvey sebagaimana ortodoks Marxis lainnya, selalu mengintai. Kita berada di era retorika neoliberalisme tentang kebebasan individu, kesetaraan, dan janjinya untuk membawa kemakmuran dan pertumbuhan, secara perlahan terungkap sebagai kepalsuan semata. Dalam tempo yang singkat, Harvey percaya, akan menjadi jelas bahwa semua kehidupan dan kelembagaan ekonomi eksis semata adalah untuk kepentingan satu kelas sosial yang kecil dalam gerakan sosial modern seperti *Occupy* dipopulerkan dengan istilah 1%, sementara masyarakat sipil sebagai 99%. Oleh karena itu, wawasan teoretis seperti yang Harvey, sodorkan dalam *A Brief History of Neoliberalism* perlu terus memelihara berbagai gerakan oposisi yang saat ini eksis. Dialog antara teori dan praktek adalah satu-satunya cara yang pasti untuk mengambil keuntungan pada saat ketika sebuah krisis baru

keuangan atau bukan menyembur ke hadapan kehidupan kita. Harapan terdalam kita adalah bahwa saat seperti itu akan menumbuhkan basis untuk kebangkitan gerakan massa menyuarakan tuntutan politik egaliter dan mencari keadilan ekonomi, perdagangan yang adil, dan keamanan ekonomi yang lebih besar.

Posisi Harvey di sini adalah anti-kapitalis dalam artian paling eksplisitnya, dan harapan dia adalah bahwa retorika neoliberalisme akan tersingkap oleh berbagai realitas dalam artian, ketimpangan ekonomi besar-besaran yang ia tumbuhkan. Hanya kemudianlah gerakan sosial akan dapat memperoleh traksi politik, dan memindahkan masyarakat menuju beberapa bentuk transformasi sosial, ekonomi dan politik.

Harvey, sebagai seorang ilmuwan sosial paling berumur saat ini, sayangnya tidak mengelaborasi lebih jauh apa dan dalam kondisi bagaimana gerakan sosial dapat dibentuk dan dipertahankan untuk mendorong transformasi dalam konteks menghubungkan teori dengan keterlibatan politik. Nampaknya kita harus mengambilnya dari ilmuwan sosial dari generasi setelah Harvey, yaitu dalam hal ini David Graeber antropolog LSE asal Amerika. Mengangkat analisis tentang hegemoni dan sifat ada dimana-mana (*omnipresent*) neoliberalisme yang dikembangkan Graeber bukan saja penting untuk memulai memikirkan bagaimana solusi kolektif yang perlu dilakukan di luar wacana namun juga relevan karena aktivisme yang dilakukannya sebagai tokoh intelektual di balik beberapa gerakan sosial populer dan berpengaruh, khususnya *the Occupy Movement*³. Graeber mengatakan dalam *Toward An Anthropological*

3. Gerakan Occupy adalah sebuah gerakan sosio-politik internasional menolak ketimpangan sosial dan kurangnya 'demokrasi riil' di dunia saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong keadilan sosial dan ekonomi dan bentuk baru demokrasi. Gerakan ini memiliki banyak cakupan berbeda; grup-grup lokal seringkali memiliki fokus yang berbeda, tetapi di antara perhatian utama gerakan ini adalah bagaimana korporasi besar (dan sistem finansial global) mengontrol dunia dalam cara yang secara berat sebelah dan tidak stabil menguntungkan minoritas tertentu serta memperlemah birokrasi. Protes Occupy pertama yang mendapatkan perhatian luas adalah Occupy (Pendudukan) Wall Street di Zuccotti Park, kota New York, yang dimulai pada 17 September 2011. Hingga Oktober 2012, protes dan pendudukan Occupy telah mengambil tempat atau terjadi di lebih dari 951 kota di 82 negara pada seluruh benua kecuali Antartica.

Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams (2001: xi):

Klaim sentral orang-orang yang merayakan postmodernisme adalah bahwa kita telah memasuki sebuah dunia di mana semua sistem yang totaliter ilmu pengetahuan, kemanusiaan, negara, kebenaran dan seterusnya semuanya telah hancur; sehingga tidak ada lagi mekanisme besar apapun untuk menjalin bersama dunia yang sekarang dipecah menjadi fragmen tak terhingga. Seseorang bahkan tidak lagi dapat membayangkan bahwa dimungkinkan adanya standar tunggal dari nilai yang dapat digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Para neoliberal di sisi lain menyanyikan puji-pujian terhadap pasar global yang, pada kenyataannya, merupakan suatu sistem pengukuran terbesar dan paling monolitik yang pernah dibuat, sebuah sistem totaliter yang akan menyubordinasi segalanya setiap objek, seluruh bidang tanah, setiap kapasitas atau hubungan manusia di planet ini untuk menjadi sebuah standar nilai.

Hal ini menjadi semakin jelas bahwa apa yang digambarkan oleh pendukung *postmodernisme* sebagian besarnya hanyalah efek dari sistem pasar yang universal neoliberalisme ini, yang, seperti halnya sistem nilai totaliter lainnya, cenderung melemparkan semua paham lain ke dalam keraguan dan kekacauan. Yang luar biasa adalah bahwa mereka gagal untuk menyadari fakta ini. Bagaimana bisa, dan mengapa begitu sulit bagi mereka menghadirkan cara untuk mengkritik sebuah sistem neoliberalisme yang nampak akan terbang menabrak segala sesuatu yang mereka serukan?

Pada kenyataannya mungkin alasannya adalah karena orang-orang yang menggunakan istilah seperti *postmodernisme* tidak melihat diri mereka menyerukan sesuatu apapun.

Mereka tidak menulis manifesto untuk gerakan posmodernis. Mereka pikir mereka hanya menjelaskan sesuatu yang sudah terlanjur terjadi, tak terelakkan, melalui satu gerakan atau jenis lain dari kekuatan struktural. Hal ini sikap mereka, sekali lagi hanyalah versi berlebihan dari sikap lain yang lebih umum.

Menurut Graeber, ini merupakan penjelasan terbaik untuk kelumpuhan masyarakat saat ini. Oleh karena telah menjadi jelas bahwa kekuatan struktural tadi tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang dapat kita masyarakat terima, maka bagi Graeber, adalah tergantung pada kita untuk datang dengan sejumlah alternatif yang sebenarnya. Bahkan selain dari kenyataan yang selalu menakutkan bahwa ini juga berarti memutuskan siapa yang dimaksud dengan kita, hal ini akan memerlukan sebuah perubahan besar-besaran dari kebiasaan teoretis. Ia berarti menerima bahwa orang-orang, sebagai bagian dari gerakan sosial dari satu jenis atau yang lain, mungkin mampu mempengaruhi jalannya sejarah secara signifikan. Alternatif yang demikian memang bisa sengaja diciptakan, dan bukan hanya terjadi secara kebetulan. Pada gilirannya akan berarti harus memberikan beberapa pemikiran serius dalam hal apa para intelektual dapat bermain secara sah dalam proses ini, dan bagaimana mereka mungkin melakukannya tanpa mengobarkan jenis dogmatisme sektarian bodoh yang sudah begitu sering kita jadi kobarkan di masa lalu. Pengalaman Graeber berkolaborasi dengan gerakan sosial semisal *Direct Action Network* hingga *Occupy Movement* menunjukkan bahwa pada banyak pertanyaan-pertanyaan ini, para aktivis telah jauh berbuat ketimbang akademisi atau peneliti di kampus dan lembaga litbang.

DAFTAR PUSTAKA

Amable, B. (2011). "Morals and Politics in the Ideology of Neo-liberalism". *Socio-Economic Review*, 9(1): 3-30.

- Aryo, B. (2012). *Tenggelam dalam Neoliberalisme?: Penetrasi Ideologi Pasar dalam Penanganan Kemiskinan*. Depok: Kepik.
- Barry, N. (1982). The Tradition of Spontaneous Order. *Literature of Liberty*, v(2): 7-58. Arlington, VA: Institute for Humane Studies. Available from Library of Economics and Liberty. URL: <http://www.econlib.org/library/Essays/LtrLbrty/bryTSO2.html>, diakses 28 Oktober 2016.
- Belanawane S., M. (2015). Kampung Siaga Bencana sebagai instrumen kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis-komunitas di Indonesia: Politik pembangunan dan partisipasi dalam diskursus pembangunan kebencanaan. *SOSIOKONSEPSIA*, 5(1): 292-324.
- Brenner, N., Peck, J. & Theodore, N. (2010). "Variegated neoliberalization: geographies, modalities, pathways", *Global Networks*, 10(2): 182-222.
- Brennetot, A. (2014). *Geohistory of neoliberalism: Rethinking the meanings of a malleable and shifting intellectual label*. *Cybergeo: European Journal of Geography, Politique, Culture, Représentations, document 677*, URL: <http://cybergeo.revues.org/26324>, diakses 27 Oktober 2016.
- Burgin, A. (2012). *The Great Persuasion: Reinventing Free Markets Since the Depression*. Cambridge: Harvard University Press.
- Collier, S. J. (2009). "Topologies of Power: Foucault's Analysis of Political Government Beyond Governmentality". *Theory, Culture, and Society*, 26(6): 78-108.
- (2012). "Neoliberalism as Big Leviathan: A Response to Wacquant and Hilgers". *Social Anthropology*, 20(2): 186-195.
- Crehan, K. (2002). *Gramsci, Culture, and Anthropology*. Berkeley, CA: University of California.
- Crouch, C. (2011). *The Strange Non-Death of Neoliberalism*. London: Polity.
- Dardot, P. & Laval, C. (2014). *The New Way of the World: on Neoliberal Society*. London: Verso.
- Davies, W. (2010). "Economics and the 'nonsense' of Law: The Case of the Chicago Antitrust Revolution". *Economy & Society*, 39(1): 64-83.
- (2013). "When is a Market Not a Market?: 'Exemption', 'externality' and 'exception' in the Case of European State Aid Rules". *Theory Culture & Society*, 30(2): 32-59.
- (2014). *The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition*. London: Sage.
- Edelman, M. and Haugerud, A. (Eds.). (2005). *The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Engelen, E. et al (2011). *After the Great Complacency: Financial Crisis and the Politics of Reform*. Oxford: Oxford University Press.
- Engelmann, S. (2003). *Imagining Interest in Political Thought: Origins of Economic Rationality*. Durham: Duke University Press.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Ferguson, J. (1994). *The Anti-Politics*

- Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- (2009). The Uses of Neoliberalism. *Antipode*, 41(S1): 166-184.
- Fine, B. & Milonakis, D. (2009). *From Economics Imperialism to Freakonomics: The Shifting Boundaries Between Economics and Other Social Sciences*. London: Routledge.
- Foucault, M. (1991). *Governmentality, in The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (Edited by G. Burchell, C. Gordon and P. Miller), pp. 87-104.
- (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège De France*. Basingtoke: Palgrave.
- Gane, N. (2013). "The Emergence of Neoliberalism: Thinking Through and Beyond Michel Foucault's Lectures on Biopolitics". *Theory, Culture & Society*, 31(1): 1-25.
- (2014). "Sociology and Neoliberalism: A Missing History". *Sociology*. 48(6): 1-15.
- Graeber, D. (2001). *Toward An Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams*. New York and Hampshire: Palgrave.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hilgers, M. (2011). The Three Anthropological Approaches to Neoliberalism. *International Social Science Journal*, 61: 351-64.
- (2012). The historicity of the neoliberal state. *Social Anthropology*, 20: 80-94.
- Lemke, T. (2001). *The Birth of Biopolitics: Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality*. *Economy & Society*, 30(2): 190-207.
- Li, T.M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham, NC: Duke University Press.
- (2011). "Rendering Society Technical: Government through Community and the Ethnographic Turn at the World Bank in Indonesia. In *Adventures in Aidland*". *The Anthropology of Professionals in International Development* (David Mosse, Ed., pp.57-80).
- Mirowski, P. & Plehwe, D. (Eds.) (2009). *The Road from Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*. Cambridge: Harvard University Press.
- (2009). *Postface: Defining Neoliberalism*. In *Mirowski & Plehwe* (eds.). Cambridge: Harvard University Press.
- (2013). *Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown*. London: Verso.
- (2014). *The Political Movement that Dared not Speak its own Name: The Neoliberal Thought Collective Under Erasure*. (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series No. 23).
- Mosse, D. (2005). *Cultivating Development: An Ethnography of Aid Policy and Practice*. London: Pluto Press.
- Nik-Kah, E. & Van Horn, R. (2012). "Inland empire: Economics imperialism as an imperative of Chicago neoliberalism". *Journal of Economic Methodology*, 19(3): 259-282.
- Peck, J. (2010). *Constructions of Neoliberal Reason*. Oxford: Oxford University Press.

- (2013). "Explaining (with) Neoliberalism". *Territory, Politics, Governance*, 1(2): 132-157.
- Peck, J., Theodore, N. & Brenner, N. (2009). "Postneoliberalism and its Malcontents". *Antipode*, 41(S1): 94-116.
- Phillips-Fein, K. (2009). *Invisible Hands: The Making of the Conservative Movement from the New Deal to Reagan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Polanyi, K. (1944, 1957, 2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Times*. Boston: Beacon Press.
- Ptak, R. (2009). *Neoliberalism in Germany: Revisiting the Ordoliberal Foundations of the Social Market Economy*. In Mirowski & Plehwe (Eds.). Cambridge: Harvard University Press.
- Rose, N. (1996). "The death of the social? Re-figuring the territory of government". *Economy & Society*, 25(3): 327-356.
- Stedman-Jones, D. (2012). *Masters of the Universe: Hayek, Friedman and the Birth of Neoliberal Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Streeck, W. (2011). "The Crises of Democratic Capitalism". *New Left Review*, 71: 5-29.
- Valdes, J. (1995). *Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Horn, R. (2011). "Chicago's Shifting Attitude toward Concentrations of Business Power (1934-1962)". *Seattle Law Review*, 34(4): 1527-1544.
- Van Horn, R. & Mirowski, P. (2009). *The Rise of the Chicago School of Economics*. In Mirowski & Plehwe (Eds.). Cambridge: Harvard University Press.
- Van Horn, R. et al. (Eds.) (2013). *Building Chicago Economics: New Perspectives on the History of America's Most Powerful Economics Program*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Venugopal, R. (2015). "Neoliberalism as concept". *Economy and Society*, 44(2): 165-187.
- Wacquant, L. (2012). "Three Steps to a Historical Anthropology of Actually Existing Neoliberalism". *Social Anthropology*, 20(1): 66-79.